

RANWAL RENJA TAHUN 2023



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 telah selesai disusun.

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategis berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi data, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada Pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 11 program dengan 22 kegiatan, dimana sebagian besar kegiatan terlaksana dengan sangat baik dan ada kegiatan yang capaiannya kurang baik. Mengenai rencana Kerja tersebut akan diuraikan dalam Bab-bab Laporan ini.

Segala keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat akan tetap dipertahankan dan diupayakan lebih baik lagi pada masa yang akan datang. Sedangkan terhadap kelemahan-kelemahan/ hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Simpang Empat, Maret 2022
**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang**

JHON EDWAR, ST
Pembina/IV/a
NIP. 19680515199003 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsif sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) OPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan untuk mengoperasionalkan RKPD dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan tahun berjalan, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain bertanggung jawab pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah.

Selanjutnya, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 akan menjadi landasan dan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2030.

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023 disusun untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2023.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai penjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya, sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengingat arti strategis Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memuat ketentuan antara lain:

- 1) Memuat program, kegiatan lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD;
- 2) Berpedoman pada Renstra OPD dengan tujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja;
- 3) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun pada rancangan awal Renja adalah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
- 4) Program dan Kegiatan dalam RENJA harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD serta disusun selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang;
- 5) Renja disajikan paling sedikit memuat pendahuluan; hasil evaluasi Renja tahun lalu; tujuan dan sasaran; rencana kerja dan pendanaan; dan penutup.
- 6) Dokumen Renja akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD dan dan menjadi rancangan RKPD Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) OPD diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Menguraikan gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD, pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2020

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, capaian Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan OPD*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN OPD

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3.2 *Tujuan dan sasaran Renja OPD*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
- 3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis

besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian tentang rencana kerja dan pendanaan masing-masing program/kegiatan yang mendukung tupoksi OPD dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah

BAB V : PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPUPR Tahun Lalu dan Capaian Renstra DPUPR

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 11 program. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja yang telah disusun pada tahun anggaran 2021. Selain itu, evaluasi pelaksanaan renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 juga memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun anggaran berjalan (tahun 2022), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat pada tahun-tahun sebelumnya.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi/melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun realisasi capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2020 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2021) disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra OPD s.d. Tahun 2020
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pasaman Barat

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) th 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja OPD Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s.d. Tahun 2022		Cat
					Target Renja OPD Tahun 2021	Realisasi Renja OPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8 (7/6)</i>	<i>9</i>	<i>10 (5+7+9)</i>	<i>11 (10/4)</i>	<i>12</i>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	80%	79%	80%	79%	99%	82%			

3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum	80%	78%	80%	78%	98%	100%			
4	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jangkauan wilayah (kecamatan) dalam pengangkutan sampah	0%	3%	0%	3%	0%	3%			
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	73%	72%	73%	72%	99%	100%			
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	59%	57%	59%	57%	96%	61%			
7	Program Penataan Bangunan Gedung	% bangunan ber- IMB per satuan bangunan	13%	12%	13%	12%	96%	14%			
8	Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah Yang Tertata Bangunan	70%	0%	70%	0%	0%	75%			

		Lingkungannya									
9	Program Penyelenggaraan Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	59%	56%	59%	56%	95%	61%			
10	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknis/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	30%	NA	30%	NA	0%	35%			
11	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan RTRW	83%	81%	83%	81%	98%	84%			

Tabel 2.1.2.
Evaluasi Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataraan Ruang
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.655.089.521	7.953.012.617 (91.88%)
a. Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.493.909	20.026.086 (58.05%)
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34.493.909	20.026.086 (58.05%)
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.679.567.071	6.484.137.421 (97.07%)
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.453.157.071	6.323.127.421 (97.98%)
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43.950.000	43.950.000 (100%)
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	182.460.000	117.060.000 (64.15%)
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	89.050.000	68.628.000 (77.06%)
1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	40.350.000	28.328.000 (70.20%)
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	48.700.000	40.300.000 (82.75%)
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.260.000	98.454.500 (85.41%)
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115.260.000	98.454.500 (85.41%)
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah	621.846.000	429.988.846 (69.14%)
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	- (0%)
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	176.220.500	131.787.100 (74.78%)
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.080.000	3.399.000 (83.30%)
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	197.010.000	88.736.000 (45.04%)

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	244.535.500	206.066.746 (84.26%)
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.000.000	36.081.000 (90.20%)
1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000	36.081.000 (90.20%)
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.590.604	210.846.789 (67.23%)
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.200.000	10.200.000 (100%)
2. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	248.050.000	145.306.185 (58.57%)
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	55.340.604	55.340.604 (100%)
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	761.281.937	604.849.975 (79.45%)
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	208.326.250	190.042.500 (91.22%)
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	104.000.000	79.030.700 (75.99%)
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	253.850.200	210.343.175 (82.86%)
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.310.000	51.540.500 (55.83%)
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	102.795.487	73.893.100 (71.88%)
B. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.115.910.478	12.611.525.903 (73.68%)
a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.415.729.702	1.384.809.280 (97.81%)
1. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1.082.179.347	1.051.709.280 (97.18%)
2. Normalisasi/Restorasi Sungai	333.550.355	333.100.000 (99.86%)

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.700.180.776	11.226.716.623 (71.50%)
1. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	110.620.000	- (0%)
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6.245.573.086	5.033.733.223 (80.59%)
3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	9.343.987.690	6.192.983.400 (66.27%)
C. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.582.703.656	9.726.799.588 (77.30%)
a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	12.582.703.656	9.726.799.588 (77.30%)
1. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.344.722.852	2.539.003.160 (75.91%)
2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	714.980.804	704.444.400 (98.52%)
3. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	3.000.000.000	1.862.907.949 (62.09%)
4. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5.523.000.000	4.620.444.080 (83.65%)
D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.067.727.888	3.026.875.500 (98.66%)
a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.067.727.888	3.026.875.500 (98.66%)
1. Penyusunan Rencana. Kebijakan. Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	116.140.000	110.831.300 (95.42%)
2. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.951.587.888	2.916.044.200 (98.79%)
E. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.121.261.936	2.455.050.600 (78.65%)

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.121.261.936	2.455.050.600 (78.65%)
1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sertifikat Laik Fungsi (SLF). peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG). Pendataan Bangunan Gedung. serta Implementasi SIMBG	129.840.000	42.394.050 (32.65%)
2. Perencanaan. Pembangunan. Pengawasan. dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2.991.421.936	2.412.656.550 (80.65%)
F. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	46.453.586.768	35.265.443.529 (75.91%)
a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	46.453.586.768	35.265.443.529 (75.91%)
1. Penyusunan Rencana. Kebijakan. dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.430.977.600	1.367.991.553 (95.59%)
2. Pembangunan Jalan	998.445.800	985.588.463 (98.71%)
3. Rekonstruksi Jalan	17.110.478.247	16.411.000.322 (95.91%)
4. Rehabilitasi Jalan	9.685.000	9.685.000 (100%)
5. Pemeliharaan Berkala Jalan	16.881.920.000	13.104.287.167 (77.62%)
6. Pemeliharaan Rutin Jalan	630.648.977	616.070.600 (97.68%)
7. Pembangunan Jembatan	9.026.953.338	2.421.909.299 (26.82%)
8. Rehabilitasi Jembatan	354.600.006	343.583.775 (96.89%)
9. Pemeliharaan Rutin Jembatan	9.877.800	5.327.350 (53.93%)
G. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	273.910.843	144.596.596 (52.78%)

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	160.574.000	82.557.736 (51.41%)
1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	94.898.000	67.870.786 (71.51%)
2. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	35.926.000	- (0%)
3. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	29.750.000	14.686.950 (49.36%)
b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	9.954.000	5.696.800 (57.23%)
1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	9.954.000	5.696.800 (57.23%)
c. Pengawasan Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	103.382.843	56.342.060 (54.49%)
1. Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	76.970.843	56.342.060 (73.19%)
2. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha. Tertib Penyelenggaraan. dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	26.412.000	- (0%)
H. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	462.588.800	175.081.900 (37.84%)
a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	75.157.800	33.216.600 (44.19%)
1. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	75.157.800	33.216.600 (44.19%)
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	387.431.000	141.865.300 (36.61%)
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	387.431.000	141.865.300 (36.61%)
I. Program Penataan Desa	2.500.000.000	- (0%)

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI
a. Penyelenggaraan Penataan Desa	2.500.000.000	- (0%)
1. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	2.500.000.000	- (0%)

Berdasarkan Tabel 2.1.1 dan Tabel 2.1.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 8 program. Program yang dilaksanakan tersebut mendukung pencapaian 7 sasaran yang dijabarkan kedalam 11 indikator sesuai Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Tahun 2021-2026, yaitu :

1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
2. Berkurangnya jumlah jorong tertinggal yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat
3. Presentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik
4. Persentase luas sawah yang beririgasi baik
5. Persentase penurunan luas genangan
6. Persentase penduduk yang mendapat akses air bersih
7. Persentase luas kawasan yang memiliki dokumen rencana ruang
8. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
9. Level Maturitas SPIP
10. Opini terhadap Laporan Keuangan
11. Nilai Sakip

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1.3** berikut :

Tabel 2.1.3.
Penilaian Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Rasio Capaian (%)
-----	-------------------	------------	---------------	-------------------

1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	75,44	67,28	89,18
2	Berkurangnya jumlah jorong tertinggal yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat	3,00	3,00	100
3	Persentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik	52,14	28,9	55,43
4	Persentase luas sawah yang beririgasi baik	80,00	80,01	100,01
5	Persentase penurunan luas genangan	25,00	25,00	100
6	Persentase penduduk yang mendapat akses air bersih	100,00	81,92	81,92
7	Persentase luas kawasan yang memiliki dokumen rencana ruang	14,92	14,92	100
8	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	7,26	7,71	106,11
9	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 2	50,00
10	Opini terhadap Laporan Keuangan	WTP	-	-
11	Nilai Sakip	B	CC	50,00

Berdasarkan Tabel 2.1.3 diatas dapat diartikan bahwa terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang telah memenuhi dan melewati dari target rencana kinerja, yaitu :

1. Berkurangnya jumlah jorong tertinggal yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat dengan realisasi 3 dari Target 2021 sebesar 3 Jorong.
2. Meningkatnya Layanan Daerah irigasi dengan realisasi 80.01% dari Target 2021 sebesar 80.00%.
3. Mengurangi Luas Genangan dengan realisasi 25% dari Target 2021 sebesar 25%.
4. Persentase luas kawasan yang memiliki dokumen rencana ruang dengan realisasi 14.92% dari Target 2021 sebesar 14.92%.
5. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang realisasi 7.26% dari Target 2021 sebesar 7.26%.

Sementara itu, 4 (empat) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja yang belum mencapai target rencana kinerja, namun diupayakan tercapai di tahun 2020, yaitu :

1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap
2. Presentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik
3. Persentase penduduk yang mendapat akses air bersih
4. Level Maturitas SPIP

5. Opini terhadap Laporan Keuangan
6. Nilai Sakip

Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD belum bisa dicantumkan karena sedang proses penilaian oleh BPKP, BPK, Inspektorat.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian Misi Pemerintah Daerah periode 2021-2026 yaitu :

Misi 3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan berbasis daya saing lokal, regional dan global, melalui pencapaian tujuan Meningkatkan sarana dan prasarana wilayah berbasis daya tampung lingkungan dengan indikator utama, yakni : Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang, Rasio jaringan irigasi baik dan sedang, Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman dan memadai.

Misi 4. Menanggulangi kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pencapaian tujuan meningkatkan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketertinggalan daerah berbasis pemberdayaan dan peningkatan kualitas lingkungan dengan indikator utama, yakni : Jumlah jorong tertinggal dan terisolir, Akses jalan poros ke daerah-daerah terpencil, Jalan akses ke daerah tertinggal dan terisolir yang terbangun, Jembatan akses ke daerah tertinggal dan terisolir yang terbangun, Cakupan jaringan air bersih daerah tertinggal dan terisolir.

Misi 6. Mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan, serta mengelola sumber daya alam dan penataan ruang secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pencapaian tujuan meningkatkan pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan penataan ruang yang berbasis daya dukung dan berwawasan lingkungan dengan indikator utama yakni : Persentase kesesuaian penataan ruang, Tersedianya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah perkotaan, Tersedianya taman tematik.

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan dan diukur dalam pernyataan indikator sasaran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2026. Pengukuran pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat hingga tahun 2020 dan proyeksi pencapaian pada tahun 2020 diuraikan pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2. (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat

No.	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra DPUPR				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap			63,92	68,17	71,20	75,44	65,78	62,84	71,20	75,44	
2	Berkurangnya jumlah jorong tertinggal yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat			13	8	5	3	10,00	4,00	5	3	
3	Persentase jalan yang memiliki sarana penunjang jalan yang berfungsi baik			38,80	43,05	47,90	52,14	38,80	25,83	47,90	52,14	
4	Persentase luas sawah yang beririgasi baik			77,50	79,00	79,50	80,00	64,56	86,74	79,50	80,00	
5	Persentase penurunan luas genangan			5,00	10,00	20,00	25,00	5,00	10,00	20,00	25,00	
6	Persentase penduduk yang mendapat akses air bersih			88,00	93,00	100,00	100,00	88,00	84,09	100,00	100,00	
7	Persentase luas kawasan yang memiliki dokumen rencana ruang			3,63	7,25	14,51	14,92	3,63	0	14,51	14,92	
8	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang			0	0	3,63	7,26	0	0	3,63	7,26	
9	Level Maturitas SPIP			3,00	3,00	3,00	3,00	2	2	3,00	3,00	

10	Opini terhadap Laporan Keuangan			<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	<i>WTP</i>	
11	Nilai Sakip			<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>CC</i>	<i>CC</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat dihadapkan pada sejumlah isu-isu penting yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah. Adapun isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah:

1. Belum adanya program jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan program (Rencana Induk Sistem) maupun validitas *data base* tentang infrastruktur yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Program pembangunan masih bersifat parsial/belum ada keterpaduan.
3. Analisis biaya dan manfaat belum dilaksanakan secara konsekwen dalam setiap pengajuan rencana kegiatan sehingga dampaknya menjadi tidak jelas.
4. Masih sangat kurang memadainya kualitas maupun kuantitas infrastruktur dan prasarana dasar lainnya.
5. Peralatan yang dimiliki masih sangat terbatas, baik kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi pelayanan dan khususnya bila terjadi kebutuhan mendesak akibat Bencana Alam dan lain sebagainya.
6. Partisipasi masyarakat masih sangat kurang dalam pemanfaatan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibangun.
7. Belum terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan tata ruang daerah.
8. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi teknis bidang ke Pu an dan Penataan Ruang
9. Belum tersedianya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tepat dan akurat.
10. Belum terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkelanjutan.
11. Belum terselenggaranya Pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi Pengaturan, Pendanaan dan Pengaman bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat berperan sebagai pelaksana dalam proses pembangunan. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat selain berkoordinasi dengan OPD terkait di tingkat Kabupaten juga berkoordinasi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian terkait. Untuk itu, aparatur pemerintah yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman

Barat harus melakukan fungsi ganda, selain menjalankan Tupoksi utama di tingkat Kabupaten, juga harus bersinergi dengan Lembaga Pemerintah/Kementerian terkait, sementara Sumber Daya Manusia yang ada saat ini masih terbatas dari segi kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan SDM serta mekanisme pelaksanaan pembangunan yang belum sesuai dengan regulasi yang berlaku dapat berimplikasi terhadap pencapaian Visi dan Misi untuk Pembangunan Daerah, seperti :

1. Banyaknya program/kegiatan yang muncul di APBD namun tidak terakomodir dalam dokumen perencanaan terkait. Akibatnya, ada kegiatan yang tidak bisa diukur pencapaiannya dan tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
2. Adanya program kegiatan yang tidak melalui tahapan perencanaan yang semestinya (tidak melalui Musrenbang di tingkat Nagari, Kecamatan, maupun Kabupaten).
3. Adanya usulan/kebutuhan masyarakat yang tidak terakomodir dalam dokumen APBD
4. Tidak tercapainya sejumlah target kinerja RPJMD karena program/kegiatan yang terdapat di dokumen rencana pembangunan tidak diakomodir dalam rencana kerja APBD
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pembangunan di daerah sangatlah membutuhkan SDM yang berkualitas dan lengkap serta ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dasar.

2.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 118.870.551.402,-** untuk pencapaian target kinerja pada tahun 2022. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 8 program (teknis dan rutin) yang direncanakan.

Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Pasaman Barat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting (Penjelasan)	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Program / kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							493,288,659,487					
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							12,170,781,017					
1	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							40,757,525					
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan OPD				3 Dokumen	40,757,525					
1	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							8,866,903,472					
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Persentase realisasi keuangan	100 %	78 Orang	100 %	7,639,643,472					
1	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan PTT/THL	Persentase realisasi keuangan	100 %	1 Tahun	100 %	1,044,800,000					
1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan	Penyediaan honorarium petugas	Persentase realisasi keuangan	100 %	12 Bulan	100 %	182,460,000					

						pemerintahan daerah	pengelola keuangan													
1	3	1	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													66,400,000	
1	3	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DPUPR	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah yang dikelola DPUPR	100 %	1 Orang	12 Bulan								40,350,000	
1	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah yang dikelola DPUPR	100 %	1 Orang	12 Bulan									26,050,000
1	3	1	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													232,932,000	
1	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	100 %	20 Orang	20 Orang									232,932,000
1	3	1	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah													758,188,800	
1	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	15 Jenis	100 %									12,667,000
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	55 Jenis	100 %									193,909,800
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %		100 %									0
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map DPUPR yang dibutuhkan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	1040000 Lembar	100 %									285,200,000

1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	12 Bulan	100 %	266,412,000					
1	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							383,366,350					
1	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	19 Unit	100 %	383,366,350					
1	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							368,158,620					
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Honor THL	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	2 Orang	100 %	22,100,000					
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map DPUPR yang dibutuhkan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	1040000 Lembar	100 %	285,550,000					
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah	100 %	5 Orang	100 %	60,508,620					
1	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,454,074,250					
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas (service dan ganti suku cadang kendaraan dinas)	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	12 Bulan	100 %	174,976,250					

1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan yang diperbaharui perizinannya	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	12 Bulan	100 %	105,700,000						
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah alat berat yang dipelihara	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	3 Unit	100 %	793,790,000						
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	152 Unit	100 %	82,670,000						
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemeliharaan berkala kantor Dinas PUPR	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah	100 %	4 Unit	100 %	296,938,000						
1	3	2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							25,337,758,127						
1	3	2	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							11,855,000,000						
1	3	2	2.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai							3,550,000,000						
1	3	2	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing		Pembangunan TPT Sungai Batang Mandiangan			150 M		8,305,000,000						
							Pengawasan Perkuatan Tebing Paket I			1 Paket								
							Pengawasan Perkuatan Tebing Paket II			1 Paket								
							Pengawasan Perkuatan Tebing Paket III			1 Paket								

1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai							0					
1	3	2	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							13,482,758,127					
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Persentase irigasi dengan kondisi baik	80 %	1 Paket	80 %	500,000,000					
							Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi			1 Paket							
							Survey Updating Kondisi Jaringan Irigasi Kecamatan Gunung Tuleh			1 Paket							
							Survey Updating Kondisi Jaringan Irigasi Kecamatan Kinali			1 Paket							
							Survey Updating Kondisi Jaringan Irigasi Kecamatan Pasaman			1 Paket							
							Survey Updating Kondisi Jaringan Irigasi Kecamatan Talamau			1 Paket							
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik		Persentase irigasi dengan kondisi baik	80 %		80 %	1,150,000,000					
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Operasi dan Pemeliharaan	Persentase irigasi dengan kondisi baik	80 %	1 Tahun	80 %	9,549,688,000					
							Pengawasan DAK Irigasi tahun 2022			1 Paket							
							Pengendalian			1 Paket							

							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Aia Salak			20 Ha									
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Aur Kuning			57 Ha									
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Durian Sabuik			20 Ha									
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lubuk Barantai			12 Ha									
							Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lubuk Lanai			13 Ha									
							Perencanaan Epaksi			1 Paket									
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Aie Garinggiang			30 Ha									
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Banda Maruok			15 Ha									
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Karumie			70 Ha									
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Kenaikan			45 Ha									
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Sarik			27 Ha									
							Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bdr. Gadang Dm Kandang			33 Ha									

1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	IPDMIP	Persentase irigasi dengan kondisi baik	80 %	1 Tahun	80 %	2,283,070,127					
1	3	3			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							43,075,000,000					
1	3	3	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota							43,075,000,000					
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Jumlah lokasi pembangunan spam kawasan perkotaan (DAK)	Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	100 %	13 Lokasi	100 %	41,325,000,000					
							Pengawasan Teknis Jaringan Air Bersih / Air Minum Paket I			1 Paket							
							Pengawasan Teknis Jaringan Air Bersih / Air Minum Paket II			1 Paket							
							Perencanaan Teknis Jaringan Air Bersih / Air Minum Paket I			1 Paket							
							Perencanaan Teknis Jaringan Air Bersih / Air Minum Paket II			1 Paket							
1	3	3	2.01	4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Persentase Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Jumlah lokasi pembangunan spam kawasan perdesaan	Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	100 %	6 Lokasi	100 %	1,750,000,000					
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	100 %		100 %	0					
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Persentase Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum		Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	100 %		100 %	0					

1	3	4				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL													1,997,550,000
1	3	4	2.01			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota													1,997,550,000
1	3	4	2.01	3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pembangunan TPS 3R di Nagari Aia Bangis				1 Unit									1,997,550,000
						Pembangunan TPS 3R di Nagari Kapa				1 Unit									
						Pembangunan TPS 3R di Nagari Sungai Aua				1 Unit									
1	3	5				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH													9,000,000,000
1	3	5	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota													9,000,000,000
1	3	5	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT														9,000,000,000
1	3	6				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE													18,183,000,000
1	3	6	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota													18,183,000,000
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Kawasan pembangunan	Updating Masterplan Drainase Perkotaan	Jumlah Kawasan pembangunan	30 Kawasan	1 Paket									1,000,000,000

							Pembangunan Gedung Kantor Camat Lembah Melintang (Lanjutan)			1 Paket								
							Pembangunan Gedung Kantor Sungai Beremas			1 Paket								
							Pembangunan Gedung olah raga (Hall) Aia Gadang			1 Paket								
							Pembangunan Gedung Pertemuan Tombang Padang			1 Paket								
							Pembangunan Gedung Serbaguna Nagari Aur Kuning			1 paket								
							Pembangunan Gedung Serbaguna Rumah Dinas Wakil Bupati			1 Paket								
							Pembangunan Landscape Kantor BPN			1 Paket								
							Pembangunan Masjid Agung Lanjutan			1 Paket								
							Pembangunan Mess Pemda Kab. Pasaman Barat Di Padang (Lanjutan)			1 Paket								
							Pembangunan Mess Pemda Kab. Pasaman Barat Di Simpang Empat (Lanjutan)			1 Paket								

1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalandan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Pembangunan Jalan Mandiangin - Katiagan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalandan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	5 KM	95 %	17,980,000,000						
							Pembangunan Jalan Paraman - Baudo			2 Paket								
							Pembukaan Jalan Kelompok Tani BKB Jorong Simpang Parit			2 KM								
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalandan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Peingkatan Jalan Padang Panjang - Lubuk Gadang Kapar	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalandan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	2 KM	95 %	268,937,563,000						
							Pelebaran Jalan Jembatan Panjang- Simpang Timbo Abu Talamau			3.7 KM								
							Pelebaran Jalan Padang Tujuh- Simpang Patai Pasaman			5.5 KM								
							Pelebaran jalan Simpang Sayur- Ampera Lembah Melintang			5.2 KM								

							Pelebaran jalan Sungai Aur - Simpang Godang Sungai Aur			10.5 KM									
							Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan			1 Paket									
							Peningkatan Jalan Jambak jalur 3 ke jalur 4 Luhak Nan Duo			0.4 KM									
							Peningkatan Jalan Jambak jalur 3 Luhak Nan Duo			0.4 KM									
							Peningkatan Jalan Jambak jalur 6 RSUD Koto Baru Luhak Nan Duo			1 Paket									
							Peningkatan Jalan Jambak Ophir Blok Sekunder I ke Blok C Luhak Nan Duo			1 KM									
							Peningkatan Jalan Jambak Simpang SD Bedeng ke Kampung II Mahakarya Luhak Nan Duo			1.5 KM									
							Peningkatan Jalan Solo Sidodadi Kinali			1.5 KM									
							Peningkatan Jalan Sumber Agung			1 KM									
							Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Blok D-Giri Maju Luhak Nan Duo			2.5 KM									

						Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Gugung Pioner-Simpang Gadang Lembah Melintang			4.2 KM										
						Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Kampuong Duo-Karambie Ampek Sasak Ranah Pasisie			1.2 KM										
						Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Kantor Camat Ujung Gading Lembah Melintang			0.85 KM										
						Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Kapunduang-Tanjung Medan Kinali			6.7 KM										
						Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Koto Baru - Maligi Sasak Ranah Pasisie			10 KM										
						Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Pati bubur-Lubuk Buntar Sungai Beremas			1.6 KM										
						Rekonstruksi struktur kapasitas jalan Pengambiran - Rura Patontang Koto Balingka			2.4 KM										
						Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Pilubang Kajai-			2.3 KM										

							Pasir Putih Talamau												
							Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Sasak-Pohon Seribu Sasak Ranah Pasisie			2.8 KM									
							Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Simpang IV Koto Sawah- Batang Gunung Lembah Melintang			5.2 KM									
							Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Simpang Sayur-Koto Sawah Lembah Melintang			4.9 KM									
							Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Situmang-Sawah Kubang Sungai Aur			1.5 KM									
							Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Skunder I-Blok C Ophir Luhak Nan Duo			2.2 KM									
							Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Sporsa-Kampung Lamo Sungai Aur			1.6 KM									
							Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Tambang Jaruang-Simpang Gadang Lembah Melintang			2.3 KM									

							Rekonstruksi struktur kapasitas Jalan Tambang Padang - Taming Tengah Ranah Batahan			5.5 KM						
							Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Tareh-Salur Lembah Melintang			4.8 KM						
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalandan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Pembangunan Jembatan Batang Biluan (Ruas KKN-Hibrida) (DAK)	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalandan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	30 Meter	95 %					17,573,606,000
							Pembangunan Jembatan Batang Masang Katiagan			80 Meter						
							Pembangunan Jembatan Batang Puai (K.301,2) (DAK)			12 Meter						
							Pembangunan Jembatan Batang Tian - Kampung Cubadak			15 Meter						
							Pembangunan Jembatan Gantung Simpang Tolang Silaping			70 Meter						
							Pembangunan Jembatan Irigasi Kampung Cubadak			7 Meter						

							Pembangunan Jembatan Jambak Jalur 8 Timur Lingkuang Aua Pasaman			1 Unit									
							Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Rura Patontang I			12 Meter									
							Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Rura Patontang II			8 Meter									
							Pembangunan Jembatan Sikilang			60 Meter									
							Pembangunan Jembatan Tombang (DAK)			30 Meter									
							Pembangunan Jembatan Tombang Jarung			50 Meter									
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalandan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalandan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %		95 %							0	
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalandan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan		Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalandan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %		95 %							0	

1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalandan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Pembangunan Jembatan Batang Biluan (Ruas KKN-Hibrida) (DAK)	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalandan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	30	95 %	46,196,017,000					
							Pembangunan Jembatan Batang Masang Katiagan			8							
							Pembangunan Jembatan Batang Pui (K.301,2) (DAK)			12							
							Pembangunan Jembatan Batang Tian - Kampung Cubadak			15							
							Pembangunan Jembatan Gantung Simpang Tolang Silaping			70							
							Pembangunan Jembatan Irigasi Kampung Cubadak			7							
							Pembangunan Jembatan Jambak Jalur 8 Timur Lingsuang Aua Pasaman			1 Unit							
							Pembangunan Jembatan Jambak Jalur 9 Timur Lingsuang Aua Pasaman			1 Unit							
							Pembangunan Jembatan Ruas Jalan			12							

1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	50 Orang	100 %	319,719,000					
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	25 Orang	100 %	67,844,000					
1	3	11	2.01	8	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	25 Orang	100 %	30,458,500					
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							57,240,000					
1	3	11	2.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi		Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih			50 Orang		57,240,000					
1	3	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							145,286,843					
1	3	11	2.04	2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1 Kali		118,874,843					
1	3	11	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		"Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi"			1 Kali		26,412,000					
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							3,966,776,000					

1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota							3,600,000,000					
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		Penyusunan RDTR Kawasan Kota Air Bangis			1 Paket		3,600,000,000					
							Penyusunan RDTR Kawasan Kota Simpang Empat			1 Paket							
							Penyusunan RDTR Kawasan Kota Ujung Gading			1 Paket							
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							366,776,000					
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase terselenggaranya penataan ruang	Jumlah perda yang dilegalisasi	Persentase terselenggaranya penataan ruang	100 %	1 Perda	100 %	366,776,000					
TOTAL												493,288,659,487					

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat adalah mendukung pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bidang urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Kabupaten

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan usulan dari masyarakat yang disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah. Usulan – usulan tersebut berupa :

1. Proposal yang disampaikan masyarakat secara berkelompok.
2. Usulan melalui Anggota DPRD.
3. Usulan melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang Nagari sampai Musrenbang Kabupaten.

Usulan – usulan tersebut diatas tetap memperhatikan tujuan dan sasaran DPUPR serta skala prioritas dan dilengkapi dengan Readiness Criteria.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN OPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan umum Nasional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga, diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Arah kebijakan tersebut meliputi 6 aspek, yaitu ;

1. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakter fisikpotensi ekonomi dan budaya lokal;
3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan Rencana Kerja 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 38 menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi;
4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis;
5. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana;

6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang;
7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi RKP 2019, Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya perlu terus ditingkatkan kinerjanya. Maka, RKP 2021 mengusung tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran pada visi 2045, ditargetkan juga bahwa pada 2036, Indonesia keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, di 2020-2024 merupakan periode penting dalam melakukan Transformasi Ekonomi untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju.

Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 menanggapi bencana pandemi COVID-19. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Kemampuan pengembangan dan pemanfaatan teknologi maju akan meningkatkan daya saing produk dan jasa dari wilayah Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat ditingkatkan nilai tambah yang dapat diterima masyarakat, baik petani, nelayan, pedagang, dan pengusaha jasa, termasuk jasa pendidikan dan jasa kesehatan. Dengan demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi akibat dari pandemi, sehingga akses masyarakat ke bidang pendidikan terutama kesehatan juga semakin membaik. Secara lebih rinci, arah kebijakan nasional dan provinsi pada periode 2021-2026 dapat dituangkan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
Kabupaten Pasaman Barat

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	Program Pembangunan RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
I	Pembangunan Manusia dan Penguatan Kemiskinan: a) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan b) Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan c) Pemerataan Layanan Pendidikan dan Pengembangan Iptek-Inovasi d) Penguatan Kemiskinan e) Pembangunan Budaya Karakter, dan Prestasi bangsa	1. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	1. Penanggulangan kemiskinan pengangguran dan daerah tertinggal berbasis pemberdayaan keluarga dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga • Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan • Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial • Program pembinaan panti asuhan /panti jompo • Program pengembangan wawasan kebangsaan • Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan • Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial • Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Nagari/Perdesaan • Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa • Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	2. Pembangunan kualitas sumber daya manusia pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan dan kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Program Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan • Program obat dan perbekalan kesehatan • Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak • Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	Program Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
				Keluarga <ul style="list-style-type: none"> • Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular • Program pengawasan obat dan makanan • Program pengembangan lingkungan sehat • Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan • Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan • Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
		3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	3. Pembangunan kualitas sumber daya manusia pembangunan pendidikan dan kesehatan yang berwawasan kependudukan dan kesetaraan gender	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pendidikan Anak Usia Dini • Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun • Program Peningkatan Kualitas Hasil Belajar • Program Manajemen Pelayanan Pendidikan • Program Pendidikan Non Formal • Program bantuan Operasional Sekolah
		4. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi	4. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan pemahaman, pengetahuan, pengamalan dan pengembangan nilai keagamaan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	Program Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
		Sarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat	nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pengembangan Prestasi Keagamaan • Program pengembangan wawasan kebangsaan • Program peningkatan peran serta kepemudaan • Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda • Program Pengembangan Nilai Budaya
II	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah: <ol style="list-style-type: none"> a) Perluasan Infrastruktur Dasar b) Penguatan Infrastruktur Daerah Tertinggal, dan Ketahanan Bencana c) Penguatan Konektivitas Multimoda dan antar moda Mendukung Pertumbuhan Ekonomi d) Peningkatan Infrastruktur Perkotaan e) Transformasi Digital 	1. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	1. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pembangunan Jalan dan Jembatan • Program Pengembangan Perumahan • Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Perkotaan • Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah • Program perencanaan pembangunan daerah • Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam • Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong • Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan • Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	Program Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
				<ul style="list-style-type: none"> • Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana • Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana • Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi • Program Pengembangan Data/ Informasi • Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan • Program Peningkatan Pelayanan Angkutan • Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas • Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa • Program kerjasama informasi dengan mas media
III	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguata Kewirausahaan dan UKM 2. Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi, Sektor Riil dan Industrialisasi 3. Peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan koperasi, IKM dan UMKM 2. Pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan penataan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM • Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan • Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan • Program peningkatan dan pengembangan ekspor • Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	Program Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
	Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja 4. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 5. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi		2. Pengembangan perdagangan, Investasi, Jasa, Pariwisata dan Industri Kreatif melalui Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja 3. Peningkatan kedaulatan pangan, agroindustri dan kemaritiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Program peningkatan dan pengembangan ekspor • Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri • Pengembangan Industri Kecil dan Menengah • Program Peningkatan Kesempatan Kerja • Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan • Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi • Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi • Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi • Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Perizinan dan Non Perizinan • Program pengembangan destinasi pariwisata • Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata • Program Pengelolaan Keragaman Budaya • Program pengembangan Industri Kreatif • Program pengembangan budidaya perikanan • Program pengembangan perikanan tangkap • Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan • Program Peningkatan Katahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) • Program Peningkatan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	Program Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
				Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan Kesejahteraan Petani • Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan • Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan • Program peningkatan produksi hasil peternakan
IV	Ketahanan Pangan, Air , Energi, dan Lingkungan Hidup: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan 2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Aksesibilitas Air 3. Pemenuhan Kebutuhan Energi melalui Penyediaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 5. Penguatan Ketahanan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis. 2. Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur 3. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kedaulatan pangan, agroindustri dan kemaritiman 2. Pembangunan infrastruktur sarana prasarana wilayah 3. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan • Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan • Program Peningkatan Katahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) • Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan • Program pengembangan budidaya perikanan • Program pengembangan perikanan tangkap • Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya • Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah • Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan • Program Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan • Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	Program Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
			lingkungan	Lingkungan Hidup <ul style="list-style-type: none"> • Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam • Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup • Program peningkatan pengendalian polusi • Program Perencanaan Tata Ruang • Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana • Program Peningkatan Kelembagaan Kebencanaan • Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana • Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam • Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana
V	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kemampuan Pertahanan 2. Peningkatan Diplomasi Politik dan Kerjasama Pembangunan Internasional 3. Penguatan Sistem Peradilan dan Upaya Anti Korupsi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat 2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter 2. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi 	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantratribmas dan pencegahan tindak kriminal Program pendidikan politik masyarakat Program penataan peraturan perundang-undangan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan

No	Prioritas Nasional /Program Prioritas Nasional RKP Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Propinsi Sumatera Barat Tahun 2022	Prioritas Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022	Program Pembangunan RKP Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022
	4. Penanggulangan Terorisme dan Peningkatan Keamanan Siber, dan Penguatan Keamanan Laut 5. Penaggulangan Narkotika dan Penguatan Kamtibmas	pemerintahan	birokrasi	pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat Tahun 2021

MISI	TUJUAN MISI	SASARAN MISI	TUJUAN DPUPR
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel dan inovatif	Penerapan tata kelola pemerintahan profesional dan inovatif	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Infrastruktur Yang Berkualitas dan Terwujudnya Penataan Kota Yang Sesuai Dengan Tata Ruang
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui pembangunan yang inklusif	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
3. Mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdaya saing	Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pemerataan pendapatan	Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan	
		Meningkatnya konektivitas wilayah	
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Pelestarian lingkungan hidup, penataan ruang wilayah dan penanggulangan bencana	Pengendalian pemanfaatan ruang	

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana tahun 2021-2026 akan direalisasikan secara bertahap dan dengan pendekatan prioritas kegiatan dengan prinsip pelayanan kepada masyarakat dan berbasis pada penataan ruang wilayah. Untuk mendukung dalam merealisasikan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan dana yang tidak hanya melalui dana APBD saja namun juga dengan mengusulkan melalui dana yang bersumber dari APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN. Secara garis besar, rencana program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 tertuang dalam 11 Program, 22 Kegiatan, 58 Sub-Kegiatan. Dengan Pagu Anggaran sebesar **Rp. 172.788.524.826,-**.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana Kerja dan Pendanaan untuk Kegiatan Tahun 2023 merupakan implementasi tahun kedua dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang secara simultan disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan agar lebih fokus mendukung pencapaian tujuan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni mewujudkan perencanaan dan pengendalian pembangunan yang tepat sasaran yang diukur melalui persentase pencapaian target kinerja RPJMD. Prioritas Pembangunan diterjemahkan kedalam 3 sasaran prioritas pembangunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat haruslah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap ketercapaian Visi dan Misi Bupati Pasaman Barat. Melalui telaahan terhadap hasil evaluasi terhadap program/kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat Tahun 2022 serta memperhatikan isu-isu global maka diperoleh rumusan yang terdiri dari 10 program, 21 kegiatan dan 58 sub-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pasaman Barat pada tahun 2022 dengan lokasi kegiatan sebagian besar berada di Kabupaten Pasaman Barat dengan total kebutuhan dana sebesar **Rp. 172.788.524.826,-** sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.

Berdasarkan analisis kebutuhan, rumusan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat TA 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2023				Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Tolok Ukur	Target								
1	1																		
1	3																		
1	3	1																	
1	3	1.2.01																	
1	3	1.2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD	Persentase realisasi keuangan		100 %	3 Dokumen	100 %	40,757,525	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		44,833,277	
1	3	1.2.02																	
1	3	1.2.02																	
1	3	1.2.02	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
1	3	1.2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Persentase realisasi keuangan		100 %	78 Orang	100 %	7,639,643,472	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		8,403,699,682	
1	3	1.2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan PTT/THL	Persentase realisasi keuangan		100 %	1 Tahun	100 %	1,044,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		1,145,280,000	
1	3	1.2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	Persentase realisasi keuangan		100 %	12 Bulan	100 %	182,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		200,706,000	
1	3	1.2.03																	
1	3	1.2.03	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah															
1	3	1.2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan pengamanan BMD pada DPUPR	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah yang dikelola DPUPR	Persentase realisasi keuangan		100 %	1 Orang	12 Bulan	40,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		44,385,000
1	3	1.2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ASN Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah yang dikelola DPUPR	Persentase realisasi keuangan		100 %	1 Orang	12 Bulan	26,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		28,655,000
1	3	1.2.05																	
1	3	1.2.05	1	Administrasi Kewenangan Perangkat Daerah															
1	3	1.2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti BIMTEK	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek	Persentase realisasi keuangan		100 %	20 Orang	20 Orang	232,932,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		256,225,200
1	3	1.2.06																	
1	3	1.2.06	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
1	3	1.2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi operasional kantor		100 %	15 Jenis	100 %	12,667,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		11,767,335	
1	3	1.2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah ATK yang dibutuhkan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi operasional kantor		100 %	55 Jenis	100 %	193,909,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		131,330,078	
1	3	1.2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah logistik yang disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi operasional kantor		100 %	1 Tahun	100 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		32,066,760	
1	3	1.2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Blanko SPT, SPDD, Kuitansi dan map DPUPR yang dibutuhkan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi operasional kantor		100 %	1040000 Lembar	100 %	285,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		313,720,000	
1	3	1.2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah penyediaan makan/minum rapat koordinasi Jumlah rapat koordinasi dari pemerintah provinsi dan pusat (K/L) yang diikuti	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi operasional kantor		100 %	12 Bulan	100 %	266,412,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		293,053,200	
1	3	1.2.07																	
1	3	1.2.07	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															
1	3	1.2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pengadaan peralatan elektronik penunjang operasional kantor dan administrasi perkantoran	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perkantoran		100 %	19 Unit	100 %	383,366,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		421,702,985	
1	3	1.2.08																	
1	3	1.2.08	1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1	3	1.2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Honor THL	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah		100 %	2 Orang	100 %	22,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		24,310,000	
1	3	1.2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Blanko SPT, SPDD, Kuitansi dan map DPUPR yang dibutuhkan	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah		100 %	1040000 Lembar	100 %	285,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		314,105,000	
1	3	1.2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Non PNS (THL) yang melaksanakan tugas K3	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah		100 %	5 Orang	100 %	60,508,620	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		66,559,482	
1	3	1.2.09																	
1	3	1.2.09	1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
1	3	1.2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemeliharaan berkala kendaraan dinas (service dan ganti saku cadang kendaraan dinas)	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		100 %	12 Bulan	100 %	174,976,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		192,473,875	
1	3	1.2.09	2	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah kendaraan yang diperbaharui perizinan	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		100 %	12 Bulan	100 %	105,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		116,270,000	
1	3	1.2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah alat berat yang dipelihara	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		100 %	3 Unit	100 %	793,790,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		275,000,000	
1	3	1.2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		100 %	152 Unit	100 %	82,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		90,937,000	
1	3	1.2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah pemeliharaan berkala kantor Dinas PUPR	Persentase terpenuhinya kegiatan penunjang operasional perangkat daerah		100 %	4 Unit	100 %	296,938,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		326,631,800	
1	3	2																	
1	3	2																	
1	3	2.2.01																	
1	3	2.2.01	9	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1	3	2.2.01	9	Pembangunan Tanggul Sungai	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Jumlah Tanggul Sungai yang dibangun	Persentase sungai dengan kondisi baik		80 %	1 Paket	80 %	3,550,000,000			Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		0	
1	3	2.2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Pembangunan TPI Sungai Batang Mudiang	Persentase sungai dengan kondisi baik		80 %	130 M	80 %	8,305,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		2,610,629,782	
1	3	2.2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Jumlah Sungai yang di normalisasi	Persentase sungai dengan kondisi baik		80 %	150 M	80 %		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		1,022,976,258	
1	3	2.2.02																	
1	3	2.2.02	1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota															
1	3	2.2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jaringan Irigasi Perencanaan Teknis Peningkatan Jaringan Irigasi Survey Updating Kondisi Jaringan Irigasi Kecamatan Gunung Tuluh Survey Updating Kondisi Jaringan Irigasi Kecamatan Kinali Survey Updating Kondisi Jaringan Irigasi Kecamatan Pasaman Survey Updating Kondisi Jaringan Irigasi Kecamatan Talamau	Persentase irigasi dengan kondisi baik		80 %	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket	80 %	500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		55,000,000	
1	3	2.2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	Persentase irigasi dengan kondisi baik		80 %	800 Meter	80 %	1,150,000,000			Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		0	
1	3	2.2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	Operasi dan Pemeliharaan Pengawasan DAK Irigasi tahun 2022 Pengendalian Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Aia Salak Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Aur Kuning Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Duran Sabak Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lubuk Barantai Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Lubuk Lana Perencanaan Ipalas Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ase Garriangiang Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Banda Maruic Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Kurumic Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Kenakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batang Surik	Persentase irigasi dengan kondisi baik		80 %	1 Paket 1 Paket 1 Paket 20 Ha 57 Ha 20 Ha 12 Ha 13 Ha 11 Paket 30 Ha 13 Ha 70 Ha 45 Ha 27 Ha	80 %	9,549,688,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengelolaan SDA dengan kondisi baik	80 %		9,549,688,000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
						Target Capaian Kinerja						Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						Tolok Ukur		
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Kantor Camat Cujung Gunung Lembah Melintang Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Kupundung-Tanjung Medan Kimali Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Koto Baru - Maligi Sasak Ranah Pasisie Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Pati buhur-Lubuk Buntar Sungai Beremas Rekonstruksi struktur kapasitas jalan Pengambiran - Rura Patontang Koto Halingka Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Pihubang Kajai-Pasir Putih Talamau Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Sasak-Pohon Seribu Sasak Ranah Pasisie Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Simpang IV Koto Sawah- Batang Gunung Lembah Melintang Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Simpang Sayur-Koto Sawah Lembah Melintang Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Situmpang-Sawah Kubang Sungai Aur Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Skunder I-Blok C Ophir Luhak Nam Duo Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Sposa-Kampung Lamo Sungai Aur Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Tambang Jarung-Simpang Gadang Lembah Melintang Rekonstruksi struktur kapasitas Jalan Tambang Padang - Taming Tengah Ranah Batahan Rekonstruksi Struktur kapasitas jalan Taroh-Salur Lembah Melintang	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	0,85 KM 6,7 KM 10 KM 1,6 KM 2,4 KM 2,3 KM 2,8 KM 5,2 KM 4,9 KM 1,5 KM 2,2 KM 1,6 KM 2,3 KM 5,5 KM 4,8 KM	95 %	268.937.563.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	266.905.723.700
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Pembangunan Jembatan Batang Biluan (Ruas KKN-Hiberda) (DAK) Pembangunan Jembatan Batang Masang Katangan Pembangunan Jembatan Batang Pua (K.301.2) (DAK) Pembangunan Jembatan Batang 1 ian - Kampung Cubadak Pembangunan Jembatan Gantung Simpang Tolang Silapang Pembangunan Jembatan Girangi Kampung Cubadak Pembangunan Jembatan Jambak Jalur 8 Timur Lingsuang Aua Pasaman Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Rura Patontang I Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Rura Patontang II Pembangunan Jembatan Sikilang Pembangunan Jembatan Tombang (DAK) Pembangunan Jembatan Tombang Jarung	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	30 Meter 30 Meter 12 Meter 13 Meter 70 Meter 7 Meter 1 Unit 12 Meter 8 Meter 60 Meter 30 Meter 30 Meter	95 %	17.573.606.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	6.817.140.000
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Jumlah jalan yang dipelihara berkala	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	1 Tahun	95 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	1.405.830.360	
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Jumlah jalan yang dipelihara rutin	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	1 Tahun	95 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	1.078.698.062	
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Pembangunan Jembatan Batang Biluan (Ruas KKN-Hiberda) (DAK) Pembangunan Jembatan Batang Masang Katangan Pembangunan Jembatan Batang Pua (K.301.2) (DAK) Pembangunan Jembatan Batang 1 ian - Kampung Cubadak Pembangunan Jembatan Gantung Simpang Tolang Silapang Pembangunan Jembatan Girangi Kampung Cubadak Pembangunan Jembatan Jambak Jalur 8 Timur Lingsuang Aua Pasaman Pembangunan Jembatan Jambak Jalur 9 Timur Lingsuang Aua Pasaman Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Rura Patontang I Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Rura Patontang II Pembangunan Jembatan Sikilang Pembangunan Jembatan Tombang (DAK) Pembangunan Jembatan Tombang Jarung	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	30 8 12 15 70 7 1 Unit 1 Unit 12 3 70 30 30	95 %	46.196.017.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	42.916.017.000
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Jumlah jembatan yang direhab	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	1 Unit	95 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	1.579.916.468	
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	Jumlah jembatan yang dipelihara rutin	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	1 Unit	95 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (> 40 km/jam)/Terlaksananya pemeliharaan jalanan jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten/Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan	95 %	65.865,580	
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI									1.859.464.123		
1	3	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi									459.823.650		
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	50 Orang	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	351.690,900	
1	3	11	2.01	6	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	25 Orang	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	74.628,400	
1	3	11	2.01	8	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	25 Orang	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	33.504,350	
1	3	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota									62.964.000		
1	3	11	2.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Jumlah pekerja konstruksi yang terlatih	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	50 Orang	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	62.964,000	
1	3	11	2.04		Pengawasan Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi									1.336.676.473		
1	3	11	2.04	2	Bimbingan Teknis tentang Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Bimbingan Teknis tentang Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	1 Kali	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	1.307.623,273	
1	3	11	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	"Pengawasan dan Evaluasi Terbit Usaha, Terbit Penyelenggaraan, dan Terbit Pemanfaatan Jasa Konstruksi"	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	1 Kali	100 %	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100 %	29.053,200	
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG									1.734.333.980		
1	3	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RTRR) Kabupaten/Kota									1.350.902.080		
									620.548.343							
									418.021.500							

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase terseleenggaranya penataan ruang	Penyusunan RDPTR Kawasan Kota Air Bangis Penyusunan RDPTR Kawasan Kota Simpang Kumpang Penyusunan RDPTR Kawasan Kota Ujung Galing	Persentase terseleenggaranya penataan ruang		100 %	1 Paket	100 %	3,600,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terseleenggaranya penataan ruang	100 %	1,350,902,080
1	3	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota												403,453,600	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Persentase terseleenggaranya penataan ruang	Jumlah perda yang dilegisilasi	Persentase terseleenggaranya penataan ruang		100 %	1 Perda	100 %	366,776,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terseleenggaranya penataan ruang	100 %	403,453,600
TOTAL													493,288,659,480			493,116,198,186		

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan satu tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran. Dengan demikian, harapan terhadap pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi dan sinergis untuk mencapai hasil yang lebih baik dapat diwujudkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat beserta seluruh personil diharapkan dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

Melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan sesuai dengan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026 yaitu **”TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN SECARA MERATA DAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PENATAAN RUANG”**.

Simpang Empat, Maret 2022
**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang**

JHON EDWAR, ST
Pembina/IV/a
NIP. 19680515199003 1 004